

DIMENSI SOSIAL-POLITIK SEA GAMES XXVI



ALAMSYAH

Dosen Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Sriwijaya

Jika tidak ada aral melintang, Sumatera Selatan akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA GAMES XXVI. Apa yang menarik ditelaah dari moment kompetisi olahraga tingkat Asia Tenggara ini? Tulisan ini akan menjelaskan dimensi sosial-politik pelaksanaan Sea Games XXVI. Kehadiran tulisan ini diharapkan dapat memberikan spektrum pemikiran yang luas dalam rangka memahami pelaksanaan event-event olahraga, baik skala lokal, nasional, regional, dan internasional.

Warisan sejarah

Olahraga sebagai bentuk olah fisik dan permainan hampir bisa ditemukan disetiap peradaban bangsa di seluruh dunia. Beragam permainan dengan menggunakan bola, beragam jenis bela diri, atletik, renang, dan berkuda merupakan sedikit contoh cabang olahraga yang sudah berusia ratusan tahun dan mengakar pada tradisi kebudayaan tertentu.

Olahraga itu penting untuk mengasah ketangkasan dan kebugaran fisik, serta kesehatan jiwa. Bahkan, beberapa jenis beladiri yang berkembang di Indonesia, Jepang, dan China sarat dengan dimensi spritual.

Olahraga sebagai urusan publik

Dewasa ini hampir semua negara memiliki departemen khusus yang menangani sektor olahraga. Mengapa negara ikut campur dalam mengelola olahraga, padahal ia bisa diorganisir dengan swakelola oleh warga masyarakat? Menurut Bergsgard, *et.al.*, (2007: 3-4), negara harus terlibat karena olahraga tidak hanya mengandung isu kesehatan fisik dan jiwa semata, tetapi juga isu sosial, ekonomi, dan politik.

Dari sisi sosial, masyarakat modern tetap melihat olahraga sebagai bagian penting dari gaya hidup mereka. Keberadaan fasilitas olahraga yang modern sama pentingnya dengan tuntutan akan jaminan penyediaan sembako. Dalam kasus negara-negara yang multi-etnik, multi-bahasa, dan multi-budaya (contohnya, bekas negara Uni Sovyet dan Yugoslavia), olahraga merupakan instrumen identitas nasional. Kehadiran tim nasional multi-etnik yang berlaga di kompetisi internasional memproduksi identitas nasional baru yang memperkuat integrasi bangsa. Di negara-negara maju, olahraga merupakan sarana untuk mengatasi beragam persoalan sosial (fragmentasi komunitas, kegemukan anak, kenakalan remaja).

Olahraga juga memiliki dimensi politik. Bagi negara-negara komunis, olahraga merupakan instrumen untuk mendemonstrasikan keunggulan ideologi sosialisme atas ideologi kapitalisme liberal. Dalam kasus hubungan internasional,

olahraga seringkali menjadi area pertarungan politik diplomatik antar negara. Sebagai contoh, pada tahun 1980, Pemerintah Amerika Serikat memboikot Olimpiade yang diadakan di Moscow, Uni Sovyet. Contoh lainnya, pada tahun 1993, DPR Amerika Serikat (the US House of Representative) mendukung proposal penolakan Beijing sebagai tuan rumah pelaksanaan Olimpiade 2000 (Houlihan, 1997: 2).

Sedangkan dari sisi ekonomi, perhelatan olahraga modern tak bisa dilepaskan dari upaya penciptaan lapangan kerja, investasi modal, dan regenerasi wilayah perkotaan dan pedesaan. Singkat kata, olahraga merupakan salah satu pilihan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Olahraga dan pembangunan ekonomi

Pembangunan pusat-pusat olahraga dan pegalangan event-event berskala nasional dan internasional tak bisa dilepaskan dari motif pembangunan ekonomi. Menurut Hoye, Nicholson, dan Houlihan (2010: 133-153), ada tiga alasan rasional dibalik kecenderungan pemerintah untuk membangun pusat-pusat olahraga dan menggelar event-event kejuaraan internasional, yakni: alasan ekonomi dan prestise sosial.

Masih segar dalam ingatan kita kondisi wilayah Jakabaring sebelum pelaksanaan PON di Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Tetapi, setelah pelaksanaan PON, wilayah Jakabaring menjelma menjadi wilayah perkotaan baru. Situasi ini menggambarkan terjadinya proses *urban and rural regeneration*.

Pelaksanaan Sea Games ke-26 akan mendorong penciptaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur fisik membutuhkan tenaga kerja dan investasi modal yang tak sedikit. Begitu pula dengan tenaga kerja yang terserap pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kegiatan ini akan mendorong datangnya ribuan wisatawan domestik dan asing ke Sumatera Selatan. Konsekuensinya, dibutuhkan banyak kamar hotel, ketersediaan sembako, dan fasilitas hiburan selama mereka menetap di Sumatera Selatan. Penyediaan fasilitas pendukung ini jelas melibatkan sektor non-olahraga yang mulai berkembang cukup positif dan signifikan di Kota Palembang.

Pelaksanaan event-event olahraga internasional juga terkait dengan prestise kota/daerah dimana event internasional itu dilaksanakan. Dalam bahasa sederhana, pelaksanaan Sea Games ke-26 akan mendorong promosi Sumatera Selatan sebagai salah satu tujuan wisata internasional, menaikkan status Sumatera Selatan di mata dunia internasional, dan membuka akses Sumatera Selatan ke pergaulan internasional secara lebih intensif.

Salah satu contoh negara yang mampu memanfaatkan pelaksanaan event olahraga internasional sebagai katalisator pembangunan ekonomi adalah Qatar. Pada tahun 2006, Qatar menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games (event olahraga internasional terbesar kedua setelah Olimpiade) yang melibatkan 12.500 atlet yang berasal dari 39 cabang olahraga. Qatar menyiapkan 44 venues di Kota Doha yang sudah dirombak total. Penyelenggaraan Asian Games dipilih elit politik Qatar karena ia adalah cara cepat untuk menjadi bagian dan menjalin persahabatan dengan negara-negara di dunia. Bagi elit politik Qatar, tak ada peradaban tanpa olahraga (Hoye, Nicholson, dan Houlihan, 2010: 138).

Karena manfaat nyata event-event kejuaraan internasional terhadap pembangunan ekonomi sangat nyata, maka setiap negara berkompetisi untuk menjadi

tuan rumah (*host*). Event internasional sekaliber Olimpiade dan Asian Games menerapkan parameter yang sangat ketat kepada setiap negara yang berkeinginan untuk mengikuti lelang tuan rumah Olimpiade dan Asian Games. Setiap negara harus menunjukkan kemampuan manfaat event tersebut bagi perbaikan seluruh dimensi kehidupan penduduk mereka.

Olahraga sebagai industri modern

Apa persamaan substantif antara pertunjukan gladiator di Zaman Romawi kuno dengan pertandingan Sriwijaya FC versus Persipura dalam rangka Indonesia Super League? Keduanya merupakan kegiatan olahraga yang bernuansa *entertainment* yang dibalut dengan unsur kompetitif.

Indonesia Super League adalah contoh bagaimana pertandingan olahraga dikemas sebagai salah satu bisnis hiburan yang sarat modal. Komoditas yang diperjual-belikan memiliki potensi pasar yang jelas dan signifikan. Hanya karena umurnya yang masih belia, kualitas komoditas dan perputaran modal di *Indonesia Super League* masih kalah jauh dengan Premier League di Inggris, Bundesliga di Jerman, dan La Liga di Italia.

Sebagai salah satu bentuk industri hiburan, olahraga memproduksi *public figure* yang sangat populer di mata masyarakat. Para atlet tak ubahnya seperti artis film dan sinetron yang diburu tanda-tanggannya.

Sebagai industri modern, olahraga merupakan hiburan. Hiburan akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Setiap generasi memiliki hiburannya sendiri. Tetapi, industri modern mensyaratkan prinsip tak ada hiburan gratis. Komersialisasi pertandingan olahraga menjadi tak terelakkan tatkala keberlangsungan olahraga harus ditopang oleh dan dari pencinta olahraga tersebut.

Argumentasi ini bisa menjelaskan mengapa perkembangan futsal di seluruh Tanah Air berkembang sangat cepat mengalahkan cabang-cabang olahraga lainnya. Meskipun umurnya relatif masih baru, tetapi tingginya permintaan menyebabkan para pemilik bersedia menanamkan modalnya untuk membangun gedung tempat bermain futsal yang modern, megah, mewah, dan nyaman.

Andaikata setiap cabang olahraga memiliki potensi pasar sepertinya futsal, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak perlu repot-repot untuk menyediakan dana APBD dalam rangka mendorong olahraga rekreasi dan olahraga amir. Pemerintah cukup fokus menggunakan dana APBD untuk menangani olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.

Agenda pasca Sea Games

Selanjutnya, yang perlu juga diperhatikan adalah perihal penanganan pasca pelaksanaan Sea Games ke-26. Gedung-gedung olahraga butuh perawatan. Pengembangan atlet perlu terus dilakukan. Siapa yang harus menanggung beban seberat ini? Siapa harus melakukan apa setelah Sumatera Selatan sukses melaksanakan Sea Games ke-26?

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional secara tersirat menyebut multi-pihak (pemerintah, komunitas pencinta olahraga, dunia usaha, media massa, dan lain-lain) sebagai aktor-aktor yang harus peduli dengan olahraga di Tanah Air. Diantara aktor-aktor ini yang paling *powerful* adalah institusi pemerintah karena faktor kepemilikan sumberdaya dan

otoritas politik. Tetapi fakta mengatakan dana APBD tak bisa dijadikan sumber penopang utama pengembangan dunia olahraga.

Selama ini sumberdaya pemerintah daerah kebanyakan dialokasikan untuk membiayai olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Sedangkan olahraga rekreasi tetap berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kerelawanan (*voluntary*). Lihatlah, khususnya di Sumatera Selatan, dalam dua belas bulan selalu ada musim bermain bola kaki, musim bermain bola volley, musim bermain badminton, musim lomba bidar, musim lomba marathon, dan sebagainya. Kecenderungan ini menunjukkan potensi olahraga rekreasi sebagai rumah pengembangan atlet (*elite sport development*) jika mekanisme kerelawanan dikelola secara profesional.

Selain dana, persoalan lain yang menghadang pengembangan dunia olahraga adalah pelanggaran *the right man on the right job*. Kebanyakan para pengurus cabang olahraga dipegang oleh birokrat senior dan/atau politisi. Situasi ini dijustifikasi dengan alasan lobi dan akses ke fasilitas pemerintah. Dengan kesibukan para birokrat dan/atau para politisi, tak heran jika pengembangan cabang olahraga prestasi terkesan megap-megap di banyak kabupaten/kota.

Poin penting lainnya yang harus dilakukan pasca pelaksanaan Sea Games adalah mensinergikan arah kebijakan dan program di sektor olahraga pemerintah provinsi dengan arah kebijakan dan program yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota. Kecenderungan yang terjadi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan cenderung jalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan sektor olahraga. Mereka hanya bertemu pada saat pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (PORDA).

Betul bahwa setiap kabupaten/kota memiliki potensi yang unik dan berbeda terkait dengan pengembangan atlet profesional (*elite sports*) di setiap cabang olahraga. Tetapi perbedaan ini tak bisa dijadikan alasan ketiadaan agenda bersama dalam mengembangkan olahraga secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pasar. Saya yakin, jika muatan-muatan politis yang melekat *inherent* dalam tubuh kepala daerah dihilangkan sejenak dan lebih mengedepankan semangat *sport for all*, maka kolaborasi antar daerah lebih mungkin diwujudkan dalam rangka mengembangkan olahraga di Bumi Sriwijaya tanpa harus membebani dana APBD.

Referensi

- Bergsgard, *et.al.*, Nils Asle., 2007. *Sport Policy: A comparative analysis of stability and change*. Amsterdam, Elsevier.
- Houlihan, Barrie., 1997. *Sport, Policy and Politics: A comparative analysis*. London, Routledge.
- Hoye, Russell., Nicholson, Matthew., dan Houlihan, Barrie., 2010. *Sport and Policy: Issues and analysis*. Amsterdam, Elsevier.